

SELASA PAHING 17 JULI 2012 ( 27 RUWAH 1945 )

# Pelajaran dari Ibukota

Suranto

**K**ENDATI hasil resmi Pilkada DKI Jakarta baru akan dirilis KPU 20 Juli mendatang, namun hasil hitung cepat (*quick count*) yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Pasangan Jokowi-Ahok menjadi pemenang dalam putaran pertama Pilkada dengan raihan suara 43%, disusul pasangan incumbent Foke-Nara yang hanya memperoleh suara 34%. Karena tidak ada pasangan yang meraih lebih dari 50% suara, maka putaran kedua akan dilakukan kemudian. Kedua pasangan akan bertarung lagi pada 20 September 2012. Terlepas hal itu, ada beberapa *lesson learned* (pelajaran yang bisa dipetik) dari pesta demokrasi di ibukota itu. Tulisan ini hendak mengupas beberapa pelajaran terpetik dari Pilkada DKI tahap pertama itu.

Pilkada DKI memang akan selalu menarik perhatian terkait dengan posisinya yang menjadi ibukota negara dan selalu menjadi *trigger* dan *trend setter* bagi daerah lain di Indonesia. Minimal terdapat enam pembelajaran yang bisa dipetik. Pertama, adanya tren calon kepala daerah dan wakilnya berasal dari kepala daerah lain yang masih aktif menjabat.

Dalam Pilkada DKI, sosok Jokowi dan Alex Noerdin adalah Walikota Solo dan Gubernur yang masih aktif. Memang tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan mengingat belum ada aturan yang mengikat terkait hal itu. Namun persoalan etika dan kepatutan saja yang kelihatannya dikorbankan. Bagaimanapun kepala daerah yang masih menjabat adalah menjalankan amanah yang diberikan rakyat untuk periode masa jabatan 5 tahun, namun ketika kemudian mencalonkan diri di daerah lain yang lebih 'gemuk' maka persoalan etika yang muncul.

Kedua, tren memunculkan pemimpin daerah yang berprestasi untuk diangkat di tingkat yang lebih tinggi. Tren ini sangat positif mengingat masyarakat bisa mendapatkan pilihan kandidat kepala daerah yang teruji kinerjanya. Memang sudah semestinya ada semacam pola jenjang karir bahwa kepala daerah yang berprestasi bisa mendapatkan *reward* untuk jabatan yang lebih

tinggi, bukan hanya berasal dari calon yang semata-mata mengutamakan sumberdaya, baik materi maupun akses saja. Hasil Pilkada DKI juga menunjukkan banyak tokoh yang diusung parpol tanpa prestasi yang bisa 'dijual'. Fenomena ini menunjukkan bahwa parpol dituntut tak hanya sekadar 'menjual' kendaraan bagi pasangan calon yang berduit, namun harus melakukan rekrutmen kader atau calon kepala daerah yang terbukti berprestasi. Implikasi dalam Pemilu 2014 pun, tren seperti ini akan cenderung berhasil mengingat para pemilih semakin kritis.

*Ketiga*, realitas bahwa *incumbent* yang memiliki keuntungan posisi dan akses bisa dikalahkan. Dalam konteks pemilih DKI, sebagian besar pemilih adalah pemilih rasional. Adanya tawaran tokoh baru yang dipopulerkan sebagai tokoh berhasil memimpin di daerah, akan menjadi solusi yang bisa dipilih. Apalagi di kalangan masyarakat ibukota, kinerja *incumbent* dianggap belum optimal dan gagal menepati janji kampanye semasa menjabat.

*Keempat*, permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selalu menjadi bahan gugatan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Gejala masih menunjukkan bahwa DPT masih akan menjadi faktor kelemahan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Hal ini bersumber dari belum tuntasnya sistem informasi administrasi kependudukan. Penyelenggara Pemilu selama ini selalu kesulitan menyusun DPT karena *raw material* data kependudukan yang diserahkan belum matang. Program e-KTP yang dicanangkan pemerintah untuk memodernisasi sistem administrasi kependudukan yang dapat diaplikasikan untuk Pemilu 2014 tampaknya masih menghadapi kendala. Dalam konteks Pilkada

da DKI, ditemukan selisih 1,2 jutaan pemilih antara data pemilih berdasar e-KTP dengan data pemilih hasil pemutakhiran KPU. Selisih data pemilih yang signifikan inilah yang kemudian dijadikan bahan gugatan oleh tim sukses pasangan calon. Sangat mungkin permasalahan DPT akan mewarnai pelaksanaan Pemilu 2014 nanti.

*Kelima*, adanya tindakan yang cukup tegas dari Dewan Kehormatan terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar aturan. Seperti diberitakan, Ketua KPU DKI telah ditegur secara tertulis oleh Dewan Kehormatan, karena tidak bersedia mengubah jumlah DPT, yang menurut tim sukses pasangan calon dan dibenarkan oleh Dewan Kehormatan, banyak ditemukan nama ganda. *Terakhir*, fenomena Pemilu di DKI Jakarta ini kendati diikuti peserta yang cukup banyak, dan pelaksanaannya cukup dinamis, namun sampai proses penetapan hasil menunjukkan kondisi yang kondusif. Hal ini tak lepas dari tingkat kejenuhan masyarakat dengan dinamika politik yang tak banyak mengubah kehidupan mereka serta sikap acuh tak acuh warga masyarakat kota metropolitan, sehingga sangatlah logis apabila tingkat partisipasi politik masyarakat relatif rendah dan pelaksanaan tidak anarkis. □ - e.

\*) **Dr Suranto**, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Peneliti pada Jusuf Kalla School of Government UMY.